



PERSETERUAN HERU - GANDUNG MERUNCING KPU Kota Laporkan DPP Partai Republiku

YOGYA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta akan melaporkan Dewan Pengurus Pusat Partai Republiku ke pihak yang berwajib. Pada verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu ditemukan indikasi pemalsuan dokumen. Saat itu persoalan tersebut tidak diumumkan ke publik karena Partai Republiku tidak lolos verifikasi untuk mengikuti Pemilu 2009.

"Kami buka sekarang tidak terlepas tuntutan Partai Republiku yang akan menuntut KPU Pusat karena tidak diloloskannya mereka dalam Pemilu 2009," kata anggota KPU Kota Yogyakarta Nasrullah SH, kepada *KR*, Kamis (21/8). Dikemukakan Nasrullah pengurus partai tersebut diduga melakukan pemalsuan dokumen untuk melengkapi berkas verifikasi faktual.

Menurut Nasrullah, dokumen yang dipalsukan adalah surat keterangan domisili atau lokasi kantor Partai Republiku di Kota Yogyakarta.

Saat dilakukan verifikasi faktual ternyata palsu dan pejabat yang berwenang tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat keterangan itu.

Seharusnya, kata Nasrullah, surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Camat Danurejan. Namun dalam dokumen yang diserahkan DPP Partai Republiku ke KPU Pusat, dokumen tersebut ditandatangani oleh Asisten Sekretaris I Pemkot Yogyakarta, Muhammad Arifin SH. "Saat kami melakukan klarifikasi, pak Muhammad

Arifin mengaku tidak pernah menandatangani, beliau juga tidak pernah menjabat Camat Danurejan," kata Nasrullah.

Lebih lanjut Nasrullah mengatakan, pemalsuan dokumen juga dilakukan karena Partai Republiku menggunakan surat berkop Kecamatan Danurejan dan cap Kecamatan Danurejan. Pihaknya dalam waktu dekat ini akan melaporkan kasus pemalsuan ini ke Poltabes Yogyakarta.

Sementara tuntutan ketidaksiapan rekrutmen bakal calon anggota legislatif di tubuh Partai Golkar kian melebar.

Kader Golkar yang telah pindah ke Partai Demokrat, Heru Wahyukismoyo dilaporkan oleh Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman ke Polda DIY. Heru dianggap telah mencemarkan nama baik organisasi. Pernyataan yang mencemarkan itu dikirimkan melalui SMS kepada wartawan dan dimuat di media. "Kita akan menyimpulkan pengacara dari Jakarta dan Yogya untuk menangani. Ini masalah serius karena sudah pencemaran partai," ujar Gandung.

Sedangkan Heru menilai pernyataannya itu merupakan persoalan politik, jadi kenapa dilaporkan ke Polda. Sebagai anggota legislatif, harusnya bijak menghadapi dinamika politik. "Jangan emosional gara-gara saya pindah partai," ujar Heru. **(R-1/Jon)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 April 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005